

Pelibatan Politik Masyarakat dan Sikap Tentang Demokrasi terhadap Toleransi Politik di Desa Powalutan

Anjelita Andale¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
 Email: 120606025@unima.ac.id, 2romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 20, 2025
 Accepted Oktober 15, 2025
 Published November 30, 2025

Keywords:

Pelibatan Politik,
 Masyarakat,
 Sikap Demokrasi,
 Toleransi Politik



Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pelibatan politik masyarakat dan sikap tentang demokrasi terhadap toleransi politik di Desa Powalutan. Toleransi politik merupakan elemen fundamental demokrasi yang memungkinkan keberagaman pandangan hidup berdampingan, namun menghadapi tantangan serius di tingkat lokal akibat polarisasi dan mobilisasi identitas dalam kompetisi politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan kunci yang dipilih secara purposif, termasuk tokoh masyarakat dan calon legislatif. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait pelibatan politik, sikap demokrasi, dan toleransi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan politik melalui strategi komunikasi persuasif dan karakteristik personal positif kandidat dapat membangun toleransi ketika menekankan prinsip tidak saling menjatuhkan. Politik memiliki pengaruh pervasif terhadap kehidupan sehari-hari, dan pemilihan kepala desa menjadi momen krusial yang seringkali menimbulkan gesekan antar kelompok, sehingga memerlukan pendewasaan politik masyarakat melalui penanaman sikap dewasa dan pemahaman tentang politik santun dan etis. Integrasi norma sosial lokal dengan praktik demokratis, terutama nilai kebersamaan dan kekeluargaan, menjadi strategi penting dalam membangun toleransi politik yang kontekstual dan berkelanjutan di tingkat desa.

Abstract

This study aims to analyze the relationship between community political engagement and attitudes about democracy toward political tolerance in Powalutan Village. Political tolerance is a fundamental element of democracy that allows diverse perspectives to coexist, but it faces serious challenges at the local level due to polarization and identity mobilization in political competition. The research method used a qualitative approach with in, depth interviews with purposively selected key informants, including community leaders and legislative candidates. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques to identify key patterns and themes related to political engagement, democratic attitudes, and political tolerance. The results show that political engagement through persuasive communication strategies and positive personal characteristics of candidates can build tolerance by emphasizing the principle of non, defeating each other. Politics has a pervasive influence on daily life, and village head elections are crucial moments that often cause friction between groups, thus requiring community political maturity through instilling mature attitudes and an understanding of polite and ethical politics. Integrating local social norms with democratic practices, especially the values of togetherness and kinship, is an important strategy in building contextual and sustainable political tolerance at the village level.

Keywords: Political Engagement, Community, Democratic Attitudes, Political Tolerance

A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi bagi warga negara telah menjadi fokus kajian politik kontemporer, khususnya dalam konteks pelibatan masyarakat di tingkat lokal. Toleransi politik merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan keberagaman pandangan dan sikap politik untuk hidup berdampingan secara damai (Sullivan & Transue, 1999). Dalam konteks Indonesia, praktik demokrasi di tingkat desa menjadi cerminan nyata dari bagaimana nilai, nilai demokratis diterapkan dan dihayati oleh masyarakat akar rumput (Antlov, 2003). Pelibatan politik masyarakat tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam musyawarah desa, pengawasan pembangunan, dan berbagai forum pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama (Geys, 2006).

Sikap masyarakat tentang demokrasi sangat mempengaruhi tingkat toleransi politik yang termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari di tingkat desa. Gibson (2006) menjelaskan bahwa toleransi politik bukan sekadar penerimaan pasif terhadap perbedaan, melainkan kesediaan aktif untuk membiarkan kelompok atau individu dengan pandangan berbeda mengekspresikan pendapat mereka meskipun tidak disetujui. Dalam masyarakat desa yang memiliki struktur sosial dengan ikatan kekerabatan dan adat yang kuat, toleransi politik seringkali diuji oleh dinamika kepentingan lokal, afiliasi kelompok, dan kompetisi politik yang dapat memicu polarisasi (Putnam, 2000). Desa Powalutan sebagai salah satu entitas pemerintahan terkecil di Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun toleransi politik di tengah keragaman aspirasi dan kepentingan warganya, sehingga menjadi lokus yang relevan untuk mengkaji hubungan antara pelibatan politik dan sikap demokratis masyarakat.

Studi tentang toleransi politik di tingkat lokal menjadi semakin penting mengingat fenomena intoleransi dan polarisasi politik yang meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Muhtadi, 2019). Desa sebagai unit terkecil pemerintahan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter demokrasi yang inklusif dan toleran, karena di sinilah interaksi sosial politik berlangsung secara langsung dan intensif (Aspinall & Berenschot, 2019). Pelibatan politik yang bermakna dapat menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi warga desa, namun demikian, pelibatan tanpa disertai pemahaman nilai, nilai demokratis yang baik justru dapat memperkuat sikap intoleran terhadap kelompok atau pandangan yang berbeda (Stolle & Hooghe, 2004). Oleh karena itu, mengkaji hubungan antara pelibatan politik masyarakat dan sikap tentang demokrasi terhadap toleransi politik di Desa Powalutan menjadi penting untuk memahami dinamika demokrasi lokal dan merumuskan strategi penguatan toleransi politik di tingkat akar rumput.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara partisipasi politik dan toleransi dalam berbagai konteks. Marcus et al. (1995) dalam studinya menemukan bahwa kecemasan politik dapat mempengaruhi tingkat toleransi seseorang terhadap kelompok yang berbeda pendapat, di mana individu yang lebih cemas cenderung kurang toleran. Sementara itu, Peffley & Rohrschneider (2003) mengeksplorasi bagaimana komitmen terhadap nilai, nilai demokrasi mempengaruhi sikap toleransi politik, dengan temuan bahwa individu dengan pemahaman demokratis yang kuat menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kelompok minoritas politik. Di konteks Indonesia, penelitian Hamid (2013) tentang partisipasi politik di daerah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan akses informasi berkorelasi positif dengan kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas politik lokal, namun tidak secara otomatis meningkatkan toleransi terhadap perbedaan politik.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Mujani & Liddle (2009) yang menganalisis

sikap demokrasi di Indonesia dan menemukan bahwa meskipun dukungan terhadap demokrasi tinggi, pemahaman substantif tentang nilai, nilai demokratis masih terbatas, khususnya di daerah pedesaan. Varshney (2002) dalam studinya tentang konflik etnis di India menekankan pentingnya civic engagement dan jaringan sosial dalam membangun toleransi antarkelompok, di mana komunitas dengan keterlibatan sipil yang kuat cenderung lebih mampu mengelola perbedaan dan mencegah konflik. Namun demikian, penelitian, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana pelibatan politik masyarakat desa dan sikap mereka tentang demokrasi secara simultan mempengaruhi toleransi politik dalam konteks sosial budaya masyarakat desa di Indonesia, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi dan budaya yang unik seperti Desa Powalutan.

Meskipun telah banyak studi yang mengkaji toleransi politik dan partisipasi demokrasi, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam literatur existing. Pertama, sebagian besar penelitian tentang toleransi politik berfokus pada konteks perkotaan atau tingkat nasional, sementara dinamika toleransi politik di tingkat desa dengan karakteristik sosial, kulturalnya yang khas masih kurang mendapat perhatian (Gibson & Gouws, 2003). Kedua, penelitian, penelitian sebelumnya cenderung mengkaji pelibatan politik dan sikap demokrasi sebagai variabel terpisah tanpa mengeksplorasi interaksi keduanya terhadap toleransi politik. Padahal, dalam realitas masyarakat desa, pelibatan politik tidak berlangsung dalam ruang hampa tetapi dipengaruhi oleh pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai, nilai demokrasi itu sendiri.

Ketiga, konteks lokal Desa Powalutan dengan struktur sosial, ekonomi, dan budayanya yang spesifik belum pernah menjadi objek kajian mendalam terkait fenomena toleransi politik. Penelitian yang ada umumnya bersifat generalisasi dan tidak menangkap nuansa lokal yang penting dalam memahami bagaimana toleransi politik terbentuk dan dipraktikkan. Keempat, ada kecenderungan dalam literatur untuk mengukur toleransi politik hanya dari aspek sikap individual, tanpa mempertimbangkan dimensi kolektif dan relasional yang sangat penting dalam masyarakat komunal seperti desa. Kesenjangan ini penting untuk dijawab mengingat toleransi politik di tingkat lokal memiliki implikasi langsung terhadap kohesi sosial, stabilitas politik, dan kualitas demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek penting. Pertama, studi ini mengintegrasikan dua dimensi yang selama ini dikaji secara terpisah, pelibatan politik aktual dan sikap tentang demokrasi, dalam satu kerangka analitis untuk menjelaskan variasi toleransi politik di tingkat desa. Pendekatan integratif ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana praktik pelibatan politik dan orientasi nilai demokratis berinteraksi membentuk toleransi politik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Kedua, penelitian ini mengeksplorasi toleransi politik bukan hanya sebagai sikap individual tetapi juga sebagai praktik sosial yang terwujud dalam interaksi dan relasi antar warga desa dengan latar belakang politik yang berbeda, sehingga menangkap dimensi relasional dan kontekstual dari toleransi politik yang selama ini terabaikan dalam literatur.

Ketiga, dengan memilih Desa Powalutan sebagai lokus penelitian, studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang demokrasi lokal di wilayah yang memiliki karakteristik sosial, budaya tertentu, sehingga memperkaya literatur tentang praktik demokrasi di tingkat akar rumput Indonesia. Keempat, penelitian ini mengembangkan instrumen pengukuran yang sensitif terhadap konteks lokal untuk menangkap berbagai bentuk pelibatan politik informal yang khas dalam masyarakat desa, seperti keterlibatan dalam musyawarah adat, gotong royong berbasis isu desa, dan forum, forum deliberatif informal—yang seringkali tidak tertangkap oleh instrumen pengukuran partisipasi politik konvensional. Kebaruan metodologis dan substantif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan demokrasi lokal yang lebih inklusif dan toleran di Indonesia.

Realitas sosial, politik di Desa Powalutan menunjukkan dinamika yang kompleks terkait

pelibatan politik dan toleransi. Sebagai sebuah komunitas dengan struktur sosial yang masih kental dengan nilai, nilai tradisional, masyarakat desa menghadapi tantangan dalam mengadaptasi praktik, praktik demokrasi modern dengan sistem sosial yang berbasis pada hierarki dan kekerabatan. Fenomena yang teramati di lapangan menunjukkan bahwa meskipun partisipasi dalam pemilihan kepala desa relatif tinggi, keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa masih terbatas pada kelompok, kelompok tertentu. Polarisasi politik yang muncul pasca pemilihan seringkali menciptakan fragmentasi sosial yang mengancam kohesi masyarakat, di mana kelompok pendukung kandidat yang kalah merasa termarginalkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan desa.

Di sisi lain, sikap masyarakat tentang demokrasi masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menginternalisasi nilai, nilai substantif demokrasi seperti penghormatan terhadap perbedaan pendapat, kebebasan berekspresi, dan inklusivitas. Konflik kepentingan antara kelompok, kelompok dalam desa, yang diperparah oleh mobilisasi politik berbasis identitas primordial, telah menciptakan ketegangan yang menguji toleransi politik masyarakat. Praktik, praktik intoleran seperti pengucilan sosial terhadap warga dengan afiliasi politik berbeda, pembatasan akses terhadap sumber daya desa berdasarkan kedekatan politik, dan resistensi terhadap kehadiran kelompok atau organisasi politik tertentu menjadi indikasi bahwa toleransi politik di Desa Powalutan menghadapi tantangan serius. Realitas ini menunjukkan urgensi untuk memahami secara mendalam bagaimana pelibatan politik dan sikap tentang demokrasi dapat dikembangkan untuk memperkuat toleransi politik sebagai fondasi demokrasi lokal yang sehat dan berkelanjutan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk menggali pemahaman yang komprehensif tentang pelibatan politik masyarakat dan sikap tentang demokrasi terhadap toleransi politik di Desa Powalutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif subjektif informan secara mendalam mengenai fenomena toleransi politik dalam konteks sosial budaya yang spesifik (Creswell, 2013). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika kompleks hubungan antara pelibatan politik, sikap demokratis, dan praktik toleransi dalam kehidupan masyarakat desa yang tidak dapat ditangkap melalui pengukuran kuantitatif semata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi, terstruktur dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga yang aktif dalam kegiatan politik di Desa Powalutan. Teknik wawancara mendalam diterapkan untuk memperoleh informasi yang kaya dan detail tentang pengalaman pelibatan politik informan, pemahaman mereka tentang demokrasi, serta praktik toleransi politik yang mereka alami atau saksikan dalam kehidupan sehari-hari di desa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan natural, sementara peneliti tetap dapat mengarahkan diskusi pada tema, tema penelitian yang relevan (Kvale & Brinkmann, 2009). Setiap sesi wawancara berlangsung antara 45 hingga 90 menit dan direkam dengan persetujuan informan untuk kemudian ditranskrip secara verbatim. Peneliti juga membuat catatan lapangan untuk menangkap konteks non verbal dan situasional yang penting dalam interpretasi data. Proses wawancara dilakukan hingga mencapai saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak ada temuan baru yang signifikan muncul dari wawancara tambahan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik yang mengikuti tahapan koding, kategorisasi, dan interpretasi (Braun & Clarke, 2006). Transkrip wawancara dibaca berulang kali untuk memperoleh pemahaman menyeluruh, kemudian dilakukan koding

terbuka untuk mengidentifikasi unit, unit makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kode, kode yang muncul kemudian dikelompokkan ke dalam kategori, kategori yang lebih abstrak dan akhirnya disintesis menjadi tema, tema utama yang merepresentasikan pola, pola temuan dalam data. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dengan melibatkan berbagai kategori informan, member checking dengan meminta informan untuk memverifikasi interpretasi peneliti, dan peer debriefing dengan mendiskusikan proses dan hasil analisis bersama rekan peneliti lain. Pertimbangan etis dalam penelitian ini mencakup informed consent, jaminan kerahasiaan identitas informan, dan hak informan untuk menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi negatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Strategi Pelibatan Politik Calon Legislatif dalam Membangun Toleransi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelibatan politik di Desa Powalutan sangat terkait dengan strategi calon legislatif dalam membangun basis dukungan melalui pendekatan yang menekankan toleransi dan komunikasi persuasif.

Menurut Bapak FM,

"...proses pencarian dukungan politik melibatkan berbagai bentuk komunikasi mulai dari sharing informal, penyampaian visi, misi secara langsung, hingga pendekatan personal yang sering disebut sebagai pendekatan "lewat tangan kanan" yang mengindikasikan adanya pemberian atau bantuan material kepada masyarakat. Jika calon legislatif mencari kedudukan dalam berdemokrasi maka yang akan terjadi adalah kesepakatan entah itu dengan janji, janji yang dijanjikan pada masyarakat desa melalui sharing, penyampaian, ataupun lewat tangan kanan."

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak FM



Sumber: Data Primer

Strategi ini mencerminkan pola politik patronase yang masih kuat dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, di mana hubungan politik tidak hanya dibangun atas dasar ideologi atau program tetapi juga melalui pertukaran material dan simbolik antara kandidat dan pemilih.

Dalam konteks ini, toleransi politik bukan semata, mata nilai normatif tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas basis dukungan politik.

Karakteristik personal kandidat menjadi faktor penting dalam membangun toleransi politik di tingkat desa. Bapak FM menekankan bahwa kandidat yang berhasil membangun dukungan luas adalah mereka yang "harus miliki jiwa yang kuat pemikiran yang cerdas dan hati yang lembut serta tutur kata yang manis agar menarik para pendukung untuk mendukung." Deskripsi ini mengindikasikan bahwa masyarakat desa menilai kandidat tidak hanya dari kompetensi intelektual atau program yang ditawarkan, tetapi juga dari kualitas karakter personal dan kemampuan interpersonal. Jiwa yang kuat merujuk pada keteguhan dan keberanian dalam berpolitik, pemikiran cerdas menunjukkan kapasitas dalam memecahkan masalah desa, hati yang lembut mencerminkan empati dan kepedulian terhadap warga, sementara tutur kata yang manis menandakan kemampuan komunikasi yang baik dan menghormati. Kombinasi kualitas ini dianggap penting untuk menciptakan atmosfer politik yang toleran karena kandidat dengan karakteristik tersebut cenderung tidak menggunakan cara, cara yang memecah belah atau menyerang lawan politik.

Sikap tidak saling menjatuhkan dalam berdemokrasi muncul sebagai prinsip penting dalam pelibatan politik yang toleran di Desa Powalutan. Bapak FM menegaskan pentingnya "menanamkan rasa toleransi yang tidak saling menjatuhkan dalam berdemokrasi." Temuan ini mengindikasikan kesadaran akan pentingnya menjaga etika politik dan kohesi sosial di tengah kompetisi politik yang ketat. Praktik tidak saling menjatuhkan ini tidak hanya berlaku bagi kandidat tetapi juga diharapkan dari para pendukung masing, masing kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi politik di desa dipahami sebagai kesediaan untuk berkompetisi secara fair tanpa menghancurkan reputasi atau martabat lawan politik. Namun demikian, implementasi prinsip ini dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama ketika kompetisi politik memanaskan strategi kampanye negatif mulai digunakan. Kesenjangan antara nilai ideal toleransi dengan praktik politik aktual menunjukkan bahwa pembangunan toleransi politik memerlukan tidak hanya kesadaran normatif tetapi juga mekanisme kontrol sosial dan regulasi yang efektif untuk memastikan prinsip, prinsip toleran benar, benar diterapkan dalam setiap tahapan proses politik.

b. Pengaruh Politik terhadap Dinamika Sosial dan Perlunya Pendewasaan Politik

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sehari, hari masyarakat desa. Bapak SP menyatakan bahwa,

"...pengaruh pelibatan politik dan sikap tentang demokrasi terhadap toleransi politik "cukup berpengaruh karena politik ini dia mempengaruhi segala sedikit keseharian kehidupan kita." Perspektif ini mengindikasikan bahwa politik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas formal dalam pemilihan atau pengambilan keputusan publik, tetapi telah meresap ke dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat. Ketika masyarakat desa memahami tentang berpolitik maka akan terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan pendapat satu orang dengan orang yang lain antara satu pihak dengan pihak lain antara golongan dengan golongan yang lain antara satu suku dengan suku lain."

Fenomena ini mencerminkan bahwa kesadaran politik yang meningkat tidak otomatis menghasilkan konsensus atau harmoni, tetapi justru mengekspos keberagaman kepentingan dan

perspektif yang selama ini mungkin tersembunyi atau ditekan dalam struktur sosial tradisional. Perbedaan, perbedaan ini merupakan sesuatu yang natural dalam demokrasi, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber konflik yang mengancam kohesi sosial.

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak SP



Sumber: Data Primer

Pemilihan kepala desa menjadi momen krusial yang mengekspose ketegangan antara partisipasi demokratis dan toleransi politik. Bapak SP memberikan contoh konkret bahwa "pada saat pemilihan politik kepala desa atau pun pimpinan desa tentunya kita harus mendewasakan masyarakat dalam prosesi pemilihan karena dalam pemilihan pucuk pimpinan yang ada di desa itu seringkali akan menimbulkan gesekan antar satu golongan dengan golongan yang tertentu dan ini akan berdampak sangat serius karena bisa jadi ini akan memicu terjadinya konflik." Fenomena ini mengindikasikan bahwa demokrasi elektoral di tingkat desa belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dengan baik, di mana kompetisi politik masih cenderung dipersepsikan sebagai zero, sum game yang melibatkan mobilisasi identitas kolektif seperti kekerabatan, kelompok, atau suku. Gesekan yang terjadi bukan hanya selama masa kampanye tetapi seringkali berlanjut pasca pemilihan, di mana kelompok pendukung kandidat yang kalah merasa termarginalkan dan mengalami diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan desa. Situasi ini menunjukkan bahwa toleransi politik di desa tidak hanya diuji pada saat kompetisi politik berlangsung, tetapi juga dalam bagaimana para pemenang dan yang kalah mengelola hubungan pasca pemilihan untuk menjaga kebersamaan dan kekeluargaan.

Pendewasaan politik masyarakat muncul sebagai kebutuhan mendesak untuk meminimalisir gesekan dan membangun toleransi yang berkelanjutan. Bapak SP menekankan bahwa "untuk menimalisir gesekan, gesekan yang terjadi perlu namanya menanamkan sikap dan mendewasakan cara pikir dan pola pandang terkait dengan berpolitik santun dan berpolitik etis, berpolitik secara dewasa sesuai dengan kaedah, kaedah yang berlaku dalam tatanan norma dan kehidupan bermasyarakat." Konsep pendewasaan politik ini mencakup beberapa dimensi penting yang dijelaskan oleh Bapak SP: pertama, penanaman sikap dan pola pikir yang dewasa; kedua, pemahaman bahwa "ketika seseorang juga berpolitik tidak berpedoman pada norma, norma tentu politik itu akan menjadi sesuatu barang yang sangat kotor," yang mengindikasikan kesadaran akan bahaya politik yang transaksional dan manipulatif; ketiga, kemampuan "mendewasakan masyarakat pemilih, pendukung untuk bisa menjalani proses ataupun prosedur pemilihan secara baik dan benar dan tertib juga menjalani kebersamaan dan kekeluargaan." Temuan ini menunjukkan bahwa toleransi politik tidak dapat dibangun hanya melalui regulasi

formal tetapi memerlukan transformasi budaya politik yang lebih fundamental, di mana masyarakat desa perlu mengembangkan kapasitas untuk membedakan antara kompetisi politik yang sah dengan konflik yang destruktif, serta kemampuan untuk memisahkan perbedaan politik dengan hubungan sosial yang lebih luas.

c. Integrasi Norma Sosial dan Etika dalam Praktik Politik Desa

Temuan penelitian mengungkapkan pentingnya integrasi antara norma sosial lokal dengan praktik politik demokratis sebagai fondasi toleransi politik di Desa Powalutan. Bapak SP menekankan bahwa berpolitik harus dilakukan "sesuai dengan norma, norma yang ada di lingkungan masyarakat dengan berhubungan juga dengan peranan kasusnya," yang mengindikasikan bahwa legitimasi politik di desa tidak hanya bersumber dari prosedur formal demokratis tetapi juga dari kesesuaian dengan sistem nilai dan norma sosial yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Norma, norma ini mencakup nilai kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap struktur sosial tradisional yang masih dihormati di desa. Integrasi ini penting karena masyarakat desa memiliki sistem sosial yang berbeda dengan masyarakat urban, di mana hubungan personal dan ikatan komunal masih sangat kuat dan mempengaruhi bagaimana politik dipraktikkan dan dipersepsikan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Bapak FM yang menekankan pentingnya pendekatan personal dan pembangunan relasi yang didasarkan pada nilai, nilai toleransi dalam setiap interaksi politik.

Konsep politik santun dan etis muncul sebagai prinsip normatif yang diharapkan dapat mengontrol perilaku politik dan membangun toleransi. Bapak SP secara eksplisit menyebutkan perlunya "berpolitik santun dan berpolitik etis, berpolitik secara dewasa sesuai dengan kaedah, kaedah yang berlaku dalam tatanan norma dan kehidupan bermasyarakat." Politik santun merujuk pada cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam arena politik yang menghormati martabat lawan politik, menghindari fitnah atau serangan personal, dan menjaga sopan santun dalam setiap debat atau perbedaan pendapat. Sementara politik etis merujuk pada kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan main yang disepakati bersama, termasuk tidak menggunakan money politics, intimidasi, atau manipulasi dalam memenangkan dukungan. Kedua prinsip ini dianggap penting untuk mencegah politik menjadi "barang yang sangat kotor" sebagaimana dikhawatirkan oleh Bapak SP. Namun demikian, tantangan dalam implementasi prinsip, prinsip ini muncul ketika ada tekanan kompetitif yang tinggi dan ketika sanksi sosial terhadap pelanggaran norma politik tidak cukup efektif untuk mencegah praktik, praktik yang bertentangan dengan nilai toleransi.

Kebersamaan dan kekeluargaan sebagai nilai utama masyarakat desa perlu dijaga dalam setiap proses politik untuk memastikan bahwa kompetisi politik tidak menghancurkan kohesi sosial. Bapak SP menegaskan pentingnya "menjalani kebersamaan dan kekeluargaan" bahkan di tengah perbedaan politik. Nilai ini mencerminkan filosofi sosial masyarakat komunal yang menempatkan hubungan sosial dan harmoni komunitas di atas kepentingan individual atau kelompok. Dalam konteks toleransi politik, ini berarti bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak hubungan kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terbangun lama dalam komunitas desa. Bapak FM juga menggarisbawahi hal serupa dengan menekankan pentingnya "menanamkan rasa toleransi yang tidak saling menjatuhkan" sebagai cara menjaga keharmonisan sosial. Praktik konkret dari nilai ini terlihat dalam upaya rekonsiliasi pasca pemilihan, di mana berbagai pihak berusaha untuk kembali membangun komunikasi dan kerjasama terlepas dari perbedaan pilihan politik yang pernah terjadi. Namun demikian,

realisasi nilai ini menghadapi tantangan ketika polarisasi politik sudah sangat dalam dan telah menciptakan luka emosional yang sulit disembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kebersamaan dan kekeluargaan memerlukan upaya proaktif dari berbagai pihak, termasuk peran mediasi dari tokoh masyarakat dan pemimpin yang dihormati, untuk memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antarkelompok yang berbeda secara politik.

2. Pembahasan

a. Strategi Pelibatan Politik dan Mekanisme Pembangunan Toleransi

Temuan penelitian tentang strategi pelibatan politik calon legislatif di Desa Powalutan menunjukkan kesesuaian dengan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Verba et al. (1995) yang menekankan bahwa partisipasi politik tidak hanya melibatkan aktivitas formal seperti pemilihan, tetapi juga berbagai bentuk komunikasi dan mobilisasi sumber daya untuk mempengaruhi keputusan politik. Strategi yang digunakan calon legislatif melalui sharing, penyampaian langsung, dan pendekatan personal mencerminkan apa yang disebut Kitschelt & Wilkinson (2007) sebagai politik klientelisme, di mana relasi patron, klien menjadi dasar pertukaran politik. Dalam konteks ini, pemberian material atau janji, janji yang ditawarkan kepada masyarakat bukan sekadar transaksi ekonomi tetapi juga merupakan bentuk pembangunan ikatan sosial yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi pola toleransi politik. Namun demikian, Aspinall & Berenschot (2019) memperingatkan bahwa politik transaksional semacam ini dapat melemahkan substansi demokrasi karena mengalihkan fokus dari program dan ideologi kepada pertukaran material jangka pendek.

Pentingnya karakteristik personal kandidat yang meliputi jiwa kuat, pemikiran cerdas, hati lembut, dan tutur kata manis dalam membangun dukungan dan toleransi sejalan dengan konsep kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bass & Riggio (2006). Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan perhatian individual kepada pengikutnya, bukan hanya mengandalkan kekuasaan formal atau sumber daya material. Dalam konteks desa dengan ikatan sosial yang kuat, karakteristik personal menjadi sangat penting karena kepercayaan dan legitimasi tidak hanya bersumber dari kompetensi teknis tetapi juga dari kualitas moral dan kemampuan interpersonal (Northouse, 2018). Temuan ini juga relevan dengan konsep social capital yang dikemukakan Putnam (2000), di mana kepercayaan interpersonal dan norma timbal balik menjadi fondasi penting bagi kerjasama dan toleransi dalam komunitas. Kandidat yang memiliki karakteristik personal positif lebih mampu membangun bridging social capital yang menghubungkan berbagai kelompok berbeda dalam masyarakat.

Prinsip tidak saling menjatuhkan dalam berdemokrasi yang ditekankan oleh informan mencerminkan konsep civic virtue yang dikemukakan oleh Galston (1991), yaitu kualitas karakter yang diperlukan untuk berfungsinya sistem politik demokratis. Mutz (2006) dalam penelitiannya tentang deliberasi demokratis menemukan bahwa paparan terhadap pandangan politik yang berbeda dapat meningkatkan toleransi jika dilakukan dalam konteks yang menghormati dan tidak bermusuhan. Namun demikian, implementasi prinsip ini dalam praktik menghadapi tantangan yang dijelaskan oleh Sunstein (2009) melalui konsep group polarization, di mana diskusi dalam kelompok yang homogen cenderung memperkuat pandangan ekstrem dan meningkatkan intoleransi terhadap kelompok luar. Dalam konteks Desa Powalutan, tantangan ini muncul ketika kompetisi politik memobilisasi identitas kelompok dan menciptakan echo chambers di mana pendukung masing, masing kandidat hanya berinteraksi dengan sesama pendukung, sehingga memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok lawan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan institutional design yang mendorong interaksi lintas

kelompok dan menciptakan insentif bagi perilaku politik yang toleran, sebagaimana disarankan oleh Varshney (2002) dalam studinya tentang pengelolaan konflik komunal.

b. Dinamika Sosial, Politik dan Urgensi Pendewasaan Demokratis

Temuan tentang pengaruh pervasif politik terhadap kehidupan sehari, hari masyarakat desa dapat dipahami melalui konsep politicization of everyday life yang dikemukakan oleh Arendt (1958), di mana politik tidak terbatas pada sphere formal tetapi meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Mansbridge (1999) menjelaskan bahwa dalam masyarakat demokratis, political talk atau percakapan politik menjadi bagian integral dari kehidupan sehari, hari yang membentuk opini, identitas, dan solidaritas sosial. Namun demikian, ketika kesadaran politik meningkat dan menghasilkan diferensiasi pendapat yang tajam, antara individu, kelompok, golongan, hingga suku, muncul risiko fragmentasi sosial yang dijelaskan oleh Lijphart (1977) dalam teorinya tentang consociational democracy. Dalam masyarakat yang terpolarisasi, demokrasi memerlukan mekanisme khusus seperti power, sharing, mutual veto, dan proporsionalitas untuk mencegah konflik terbuka dan memelihara stabilitas. Konteks Desa Powalutan menunjukkan bahwa diferensiasi politik yang muncul belum diimbangi dengan institutional arrangement yang memadai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif.

Fenomena gesekan dan potensi konflik dalam pemilihan kepala desa mencerminkan apa yang disebut Horowitz (1985) sebagai ethnic or group, based electoral competition, di mana pemilihan menjadi arena mobilisasi identitas kolektif yang dapat mengancam kohesi sosial. Chandra (2004) menjelaskan bahwa dalam konteks di mana politik sangat terpatronisasi, pemilihan sering dipersepsikan sebagai kompetisi untuk mengakses sumber daya negara yang terbatas, sehingga stakes, nya sangat tinggi dan memicu mobilisasi identitas primordial. Temuan bahwa gesekan dapat berdampak sangat serius hingga memicu konflik sejalan dengan penelitian Wilkinson (2004) tentang riot, prone districts di India, di mana kompetisi elektoral yang intens dalam konteks institusi yang lemah dapat menghasilkan kekerasan komunal. Dalam konteks Desa Powalutan, lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa dan kurangnya norma bersama tentang fair play dalam kompetisi politik membuat pemilihan kepala desa menjadi momen yang sangat rentan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya apa yang disebut Anderson (1983) sebagai "institutional learning," di mana masyarakat secara gradual belajar untuk memisahkan kompetisi politik dari konflik sosial yang destruktif.

Konsep pendewasaan politik yang ditekankan oleh informan resonan dengan teori political socialization yang dikemukakan oleh Hyman (1959) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Jennings & Niemi (1981), yang menjelaskan proses di mana individu dan masyarakat mempelajari nilai, sikap, dan perilaku politik yang sesuai dengan sistem demokratis. Almond & Verba (1963) dalam *The Civic Culture* menekankan pentingnya civic culture, kombinasi antara partisipasi aktif dan sikap yang moderat, sebagai fondasi demokrasi yang stabil. Konsep "berpolitik santun dan etis" yang dikemukakan informan sejalan dengan konsep civility yang dikemukakan oleh Shils (1997), yaitu sikap menghormati dan pertimbangan terhadap kepentingan orang lain dalam kehidupan publik. Boyd (2006) menjelaskan bahwa civility bukan sekadar kesopanan superfisial tetapi mencerminkan komitmen moral terhadap martabat sesama warga dan kesediaan untuk mencari common ground di tengah perbedaan. Pendewasaan politik juga mencakup apa yang disebut Dalton (2008) sebagai cognitive mobilization, di mana masyarakat mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi politik secara kritis dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional daripada emosi atau loyalitas kelompok semata. Dalam konteks Desa Powalutan, proses pendewasaan ini memerlukan intervensi sistematis melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan pemimpin lokal, dan penciptaan ruang, ruang deliberasi yang inklusif.

c. Peran Norma Sosial dan Nilai Kekeluargaan dalam Konsolidasi Toleransi

Temuan tentang pentingnya integrasi norma sosial lokal dengan praktik politik demokratis sejalan dengan teori *embedded democracy* yang dikemukakan oleh Grugel (2002), yang menekankan bahwa keberhasilan demokrasi sangat tergantung pada sejauh mana institusi dan praktik demokratis dapat berakar dalam konteks sosial, budaya masyarakat setempat. Gibson & Gouws (2003) dalam studinya tentang Afrika Selatan menemukan bahwa toleransi politik lebih mudah berkembang ketika nilai, nilai demokratis dikaitkan dengan norma dan tradisi lokal yang sudah ada daripada diimpor sebagai konsep asing. Dalam konteks Indonesia, Bouchier (2015) menjelaskan bahwa nilai, nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan dapat menjadi *cultural resources* yang mendukung praktik demokratis, meskipun juga dapat menjadi hambatan jika digunakan untuk membenarkan paternalisme atau conformity. Temuan di Desa Powalutan menunjukkan bahwa masyarakat tidak melihat kontradiksi antara norma tradisional dengan demokrasi, tetapi justru berusaha menyintesis keduanya dalam praktik politik sehari-hari.

Konsep politik santun dan etis yang ditekankan oleh informan mencerminkan apa yang disebut Thompson & Hoggett (2001) sebagai *emotional dimension of politics*, di mana perasaan, empati, dan moralitas memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik. Neblo et al. (2010) dalam penelitiannya tentang *deliberative democracy* menemukan bahwa kualitas deliberasi sangat dipengaruhi oleh norma komunikasi yang berlaku, di mana ruang deliberatif yang menerapkan standar kesantunan dan saling menghormati menghasilkan outcome yang lebih inklusif dan diterima oleh berbagai pihak. Forst (2012) menjelaskan bahwa toleransi memerlukan dua elemen penting: pertama, *objection* atau ketidaksetujuan terhadap pandangan orang lain; kedua, *acceptance* atau penerimaan terhadap hak orang lain untuk memegang pandangan tersebut. Dalam konteks Desa Powalutan, politik santun dan etis menyediakan *framework* normatif yang memungkinkan warga untuk tidak setuju secara substansial namun tetap menghormati secara prosedural. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa norma ini diterapkan secara konsisten dan tidak hanya menjadi retorika kosong, sebagaimana diingatkan oleh Herbst (2010) bahwa kesenjangan antara *civic rhetoric* dan *actual practice* dapat menghasilkan sinisme dan melemahkan komitmen terhadap nilai, nilai demokratis.

Penekanan pada kebersamaan dan kekeluargaan sebagai nilai fundamental yang harus dijaga dalam proses politik resonan dengan konsep *communitarian democracy* yang dikemukakan oleh Etzioni (1995), yang menekankan pentingnya menyeimbangkan hak individual dengan tanggung jawab komunal. Tocqueville (1835/2000) dalam *Democracy in America* mengamati bahwa kekuatan demokrasi Amerika terletak pada *voluntary associations* dan *spirit of community* yang kuat, yang mencegah individualisme atomistik dan memelihara *civic engagement*. Dalam konteks Indonesia, konsep gotong royong dan kekeluargaan memiliki fungsi serupa dalam menjaga kohesi sosial dan mendorong partisipasi (Bowen, 1986). Namun demikian, Mansbridge (1980) memperingatkan bahwa komunitas yang sangat kohesif juga dapat menjadi *oppressive* terhadap minoritas atau individu yang deviant, sehingga penting untuk menyeimbangkan nilai kebersamaan dengan penghormatan terhadap keberagaman dan hak individual. Temuan di Desa Powalutan menunjukkan tensions antara keinginan untuk memelihara harmoni komunal dengan realitas diferensiasi politik yang semakin nyata. Resolusi tensions ini memerlukan apa yang disebut Young (2000) sebagai "*politics of difference*," di mana keberagaman diakui dan diakomodasi dalam kerangka solidaritas yang lebih luas. Hal ini dapat diwujudkan melalui *institutional innovations* seperti forum musyawarah inklusif yang secara eksplisit memberikan voice kepada berbagai kelompok, mekanisme power, sharing

dalam pemerintahan desa, dan program, program yang membangun bridging social capital lintas kelompok politik.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa pelibatan politik masyarakat dan sikap tentang demokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap toleransi politik di Desa Pawalutan, namun hubungan tersebut bersifat kompleks dan dimediasi oleh berbagai faktor kontekstual. Pelibatan politik yang termanifestasi dalam strategi calon legislatif melalui komunikasi persuasif, pembangunan relasi personal, dan mobilisasi dukungan berpotensi membangun toleransi ketika dilakukan dengan menekankan karakteristik personal positif dan prinsip tidak saling menjatuhkan. Namun, pelibatan politik yang berbasis pada patronase dan mobilisasi identitas kelompok juga dapat memicu polarisasi dan mengikis toleransi, terutama dalam konteks pemilihan kepala desa yang seringkali menimbulkan gesekan dan potensi konflik. Sikap tentang demokrasi yang masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menginternalisasi nilai, nilai substantif seperti penghormatan terhadap perbedaan dan inklusivitas menjadi tantangan dalam membangun toleransi politik yang berkelanjutan. Pendewasaan politik masyarakat melalui penanaman sikap dewasa, pemahaman tentang politik santun dan etis, serta kemampuan untuk memisahkan kompetisi politik dari konflik sosial menjadi kebutuhan mendesak yang memerlukan intervensi sistematis.

Integrasi antara norma sosial lokal dengan praktik politik demokratis muncul sebagai strategi penting dalam membangun toleransi politik yang kontekstual dan sustainable. Nilai, nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi karakteristik masyarakat desa dapat menjadi cultural resources yang mendukung toleransi, namun juga perlu diseimbangkan dengan pengakuan terhadap keberagaman politik dan hak untuk berbeda pendapat. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah konkret: pertama, pengembangan program pendidikan politik yang menekankan nilai, nilai demokratis substantif dan kemampuan berpikir kritis; kedua, penguatan mekanisme deliberasi inklusif yang memberikan ruang bagi semua kelompok untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; ketiga, pengembangan kode etik politik lokal yang mengatur perilaku kandidat dan pendukung selama proses pemilihan; keempat, penguatan peran tokoh masyarakat dan pemimpin agama sebagai mediator dan role model dalam mempraktikkan toleransi; kelima, penciptaan program, program yang membangun bridging social capital lintas kelompok politik untuk mengurangi polarisasi. Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen dari berbagai stakeholders termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi sipil, dan masyarakat sendiri untuk bersama, sama membangun demokrasi lokal yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Antlov, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193, 214.
- Arendt, H. (1958). *The human condition*. University of Chicago Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum

- Associates.
- Bourchier, D. (2015). *Illiberal democracy in Indonesia: The ideology of the family state*. Routledge.
- Bowen, J. R. (1986). On the political construction of tradition: Gotong royong in Indonesia. *Journal of Asian Studies*, 45(3), 545, 561.
- Boyd, R. (2006). The value of civility? *Urban Studies*, 43(5, 6), 863, 878.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77, 101.
- Chandra, K. (2004). *Why ethnic parties succeed: Patronage and ethnic head counts in India*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Dalton, R. J. (2008). Citizenship norms and the expansion of political participation. *Political Studies*, 56(1), 76, 98.
- Etzioni, A. (1995). *The spirit of community: Rights, responsibilities and the communitarian agenda*. Fontana Press.
- Forst, R. (2012). *Toleration in conflict: Past and present*. Cambridge University Press.
- Galston, W. A. (1991). *Liberal purposes: Goods, virtues, and diversity in the liberal state*. Cambridge University Press.
- Geys, B. (2006). Explaining voter turnout: A review of aggregate, level research. *Electoral Studies*, 25(4), 637, 663.
- Gibson, J. L. (2006). Enigmas of intolerance: Fifty years after Stouffer's communism, conformity, and civil liberties. *Perspectives on Politics*, 4(1), 21, 34.
- Gibson, J. L., & Gouws, A. (2003). *Overcoming intolerance in South Africa: Experiments in democratic persuasion*. Cambridge University Press.
- Grugel, J. (2002). *Democratization: A critical introduction*. Palgrave Macmillan.
- Hamid, A. (2013). Pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa partai politik (studi kasus Pilkada Kabupaten Bone tahun 2008). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 13, 30.
- Herbst, S. (2010). *Rude democracy: Civility and incivility in American politics*. Temple University Press.
- Horowitz, D. L. (1985). *Ethnic groups in conflict*. University of California Press.
- Hyman, H. H. (1959). *Political socialization: A study in the psychology of political behavior*. Free Press.
- Jennings, M. K., & Niemi, R. G. (1981). *Generations and politics: A panel study of young adults and their parents*. Princeton University Press.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (Eds.). (2007). *Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition*. Cambridge University Press.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). Sage Publications.
- Lijphart, A. (1977). *Democracy in plural societies: A comparative exploration*. Yale University Press.
- Mansbridge, J. (1980). *Beyond adversary democracy*. Basic Books.
- Mansbridge, J. (1999). Everyday talk in the deliberative system. In S. Macedo (Ed.), *Deliberative politics: Essays on democracy and disagreement* (pp. 211, 239). Oxford University Press.
- Marcus, G. E., Sullivan, J. L., Theiss, Morse, E., & Wood, S. L. (1995). *With malice toward some: How people make civil liberties judgments*. Cambridge University Press.
- Muhtadi, B. (2019). *Voting behavior in Indonesia: Parties, candidates, and the 2014 elections*. Routledge.

- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2009). Muslim Indonesia's secular democracy. *Asian Survey*, 49(4), 575, 590.
- Mutz, D. C. (2006). *Hearing the other side: Deliberative versus participatory democracy*. Cambridge University Press.
- Neblo, M. A., Esterling, K. M., Kennedy, R. P., Lazer, D. M., & Sokhey, A. E. (2010). Who wants to deliberate—and why? *American Political Science Review*, 104(3), 566, 583.
- Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Peffley, M., & Rohrschneider, R. (2003). Democratization and political tolerance in seventeen countries: A multi, level model of democratic learning. *Political Research Quarterly*, 56(3), 243, 257.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Shils, E. (1997). *The virtue of civility: Selected essays on liberalism, tradition, and civil society*. Liberty Fund.
- Stolle, D., & Hooghe, M. (2004). The roots of social capital: Attitudinal and network mechanisms in the relation between youth and adult indicators of social capital. *Acta Politica*, 39(4), 422, 441.
- Sullivan, J. L., & Transue, J. E. (1999). The psychological underpinnings of democracy: A selective review of research on political tolerance, interpersonal trust, and social capital. *Annual Review of Psychology*, 50(1), 625, 650.
- Sunstein, C. R. (2009). *Going to extremes: How like minds unite and divide*. Oxford University Press.
- Thompson, S., & Hoggett, P. (2001). The emotional dynamics of deliberative democracy. *Policy & Politics*, 29(3), 351, 364.
- Tocqueville, A. de. (2000). *Democracy in America* (H. C. Mansfield & D. Winthrop, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1835)
- Varshney, A. (2002). *Ethnic conflict and civic life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Wilkinson, S. I. (2004). *Votes and violence: Electoral competition and ethnic riots in India*. Cambridge University Press.
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.